LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/ 312 /18/2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut ;

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 - 02 - 2023

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sragen;
2. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi

Kata Pengantar

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022, ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, Pebruari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, SH
NIP 19670708 199303 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* penting. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu

1. Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)
2. Jumlah PMA/ PMDN (investor)

Realisasi kinerja indikator **Nilai realisasi penanaman modal** tahun 2022 sebesar **2,1** trilyun rupiah sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **1,5** trilyun rupiah sehingga capaian kinerjanya sebesar 140% masuk kategori **Sangat Baik**. Realisasi kinerja indikator

Jumlah PMA/ PMDN tahun 2022 sebesar **8.077** investor sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **1.378** sehingga capaian kinerjanya sebesar 586% masuk kategori **Sangat Baik.**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

			Hal
HALAMAN JUDUL			i
KATA PENGANTAR			ii
IKHTISAR EKSEKUTIF			iii
DAFTAR ISI			v
DAFTAR TABEL			
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Gambaran Umum Instansi	2
	1.3	Isu Strategis	5
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		7
	2.1	Perencanaan Strategis	7
	2.1.1	Visi dan Misi	7
	2.1.2	Tujuan dan sasaran	7
	2.1.3	Indikator Kinerja Utama	8
	2.2	Perjanjian Kinerja	9
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA		12
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	12
	3.2	Analisis Capaian Kinerja	13
	3.3	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15
	3.4	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	18
	3.5	Akuntabilitas Keuangan	25
	3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	27
BAB IV.	PENUTUP		29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	9
Tabel. 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
Tabel. 2.2	Perubahan Kinerja TAhun 2022	11
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	12
Tabel 3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022	
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dua Tahun sebelumnya	14
Tabel. 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra	14
Tabel. 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	15
Tabel. 3.5	Analisis Keberhasilan	15
Tabel. 3.6	Analisis Pendukung/Hambatan Capaian Kinerja	16
Tabel. 3.8	Efisiensi Anggaran TAhun 2023	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yangmenggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sertaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkandapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misiorganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapansistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1.2 GAMBARAN UMUM INSTANSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai fungsi:

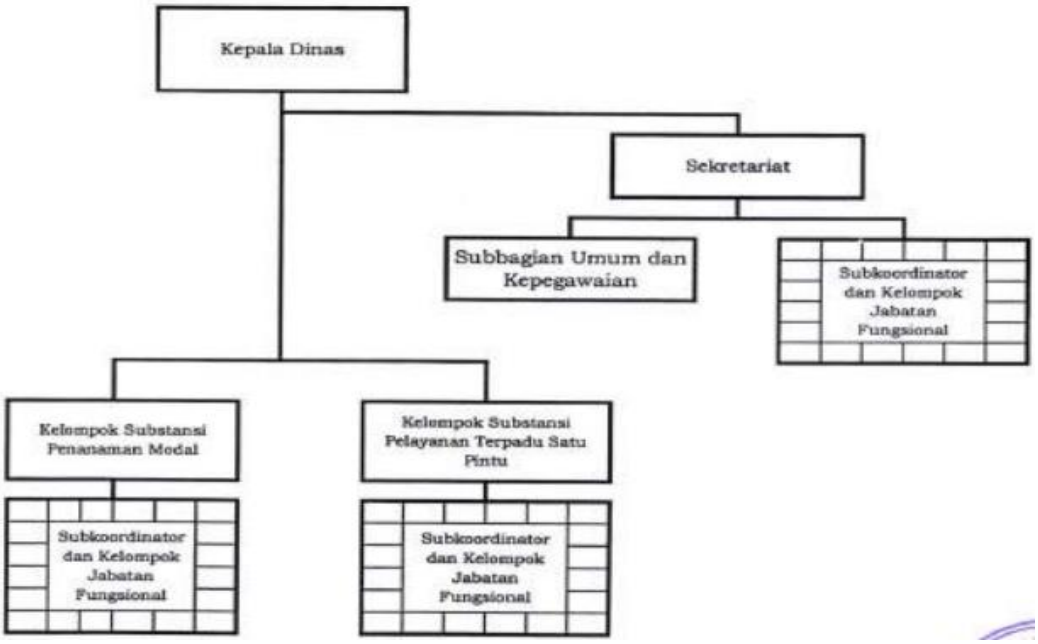
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN



Gambar 1.1

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

TABEL 1.1
JUMLAH ASN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				8	7	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b						
Golongan III/a					3	
Jumlah Golongan III	0	0	0	9	10	19
Golongan II/d						
Golongan II/c						
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	11	11	25

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2022

TABEL 1.2
JUMLAH ASN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	19
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**25**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2022

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Perencanaan Penanaman Modal belum optimal
2. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik calon investor
3. Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal
4. Banyak potensi investasi belum teridentifikasi
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
6. Belum optimalnya publikasi bidang perizinan/ nonperizinan;
7. Munculnya permasalahan perizinan
8. Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih
9. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*One Single Submission*) belum optimal
10. Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;

2. Perlunya pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (*mal pelayanan publik)*;
3. Kurangnya kualitas promosi investasi;
4. Masih lemahnya kerjasama penanaman modal dengan *stake holder*;
5. Belum adanya kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
6. Masih kurangnya kajian potensi sektor investasi;
7. Belum optimalnya dukungan teknologi informasi atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission*);
8. Belum optimalnya pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
9. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat;
10. Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan/ nonperizinan;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi 1pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

2.1.1 Visi dan Misi

- Visi

  Visi Bupati Sragen "**Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong**"

- Misi

  Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menerapkan Misi Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi yang diharapkan dapat tercapai yaitu: **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan"**

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut "**Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah**" Dengan indikator tujuan sebagai berikut **Nilai realisasi penanaman modal**

2.1.2.2. Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah**

Dalam mencapai Sasaran tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen menerapkan Indikator Sasaran agar Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen yang diharapkan dapat tercapai antara lain sebagai berikut **Jumlah PMA/PMDN (investor).**

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3		4
1.	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . Formulasi Pengukuran: Nilai investasi dalam tahun berjalan. Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal
2.	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/investor)	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). Formulasi Pengukuran: Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,50	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.250	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,10)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.916.528.546	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	152.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	385.927.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	402.873.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU
	JUMLAH	6.977.328.546	

1.3 PERUBAHAN/PERBEDAAN PERENCANAAN KINERJA

TABEL 2.3
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,50	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.250	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,10)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	7.171.444.870	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	152.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	531.659.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	402.873.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DAU
	JUMLAH	8.392.976.870	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN PENCAPAIAN
SASARAN KINERJA

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen Tahun 2022 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2022

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
					TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	KATEGORI
1		2	3	5	6	7	8	9
1		**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,50	2,1	140%	Sangat Baik
1	1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	1.250	8770	702%	Sangat Baik
1	2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB (70,10)	B (68,95)	98%	Baik

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 sudah **Sangat Baik**.

1.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2020			2021			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	1,98	1,98	100	2,1	2,1	100	1,50	2,1	140
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.735	13.911	802	1.785	6.072	340	1.250	8770	702%

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik.**

1.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	1,7	2,1	140	Melebihi Target

1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.250	1.519	702	Melebihi Target

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2022 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.

1.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STANDAR NASIONAL		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	0,77	2,1	272
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	-	-	-

3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

TABEL 3.6
ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TAHUN 2022					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,50	2,1	140	Sangat Baik	Meningkatnya realsiasi penanaman modal di Kabupaten Sragen selain dikarenakan karena iklim investasi yang konsudif juga didukung oleh kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui OSS RBA. Penerbitan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) bagi UMKM serta bagi usaha dengan tingkat resiko rendah dan menengah rendah sangat mudah, sehingga cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah melakukan kegiatan usaha	
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.250	8770	702%	Sangat Baik	Peninngkatan realisasi penanaman modal diharapkan berbanding lurus dengan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Dengan kemudahan dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka mampu mendorong meningkatnya jumlah PMA/PMDN.	

3.4 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

TABEL 3.7
ANALISIS PENDUKUNG/ HAMBATAN CAPAIAN KINERJA

NO					TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN (MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG)
1					2	3	4	5	6	7	12
1					**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	140				
1	1				**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	702%				
2	18	2						**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**10,00**	Mendukung
2	18	2	01					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	2	01	02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	3	01					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**41,00**	Mendukung
2	18	3	01	01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	jumlah even promosi [kali]	100,00	Mendukung

								menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	3	01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	4						**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**86,75**	Mendukung
2	18	4	01					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	Mendukung
2	18	4	01	01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.059,56	Mendukung
2	18	4	01	02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	272,80	Mendukung
2	18	4	01	03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	113,75	Mendukung
2	18	4	01	04				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	96,00	Mendukung
2	18	5						**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10,00**	Mendukung
2	18	5	01					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	Mendukung

								menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	5	01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	100,00	Mendukung
2	18	5	01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	102,86	Mendukung
2	18	5	01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100,00	Mendukung
2	18	6						**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**30,00**	Mendukung
2	18	6	01					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	100,00	Mendukung
2	18	6	01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	500,00	Mendukung
					Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	98%				Mendukung
2	18	1						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100,00**	Mendukung
2	18	1	02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	116,67	Mendukung
2	18	1	02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	96,00	Mendukung

2	18	1	05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	1	05	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	91,18	Mendukung
2	18	1	06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	237,50	Mendukung
2	18	1	06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	148,00	Mendukung
2	18	1	06	10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	1	07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	100,00	Mendukung
2	18	1	07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	100,00	Mendukung

2	18	1	08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	10				Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	100,00	Mendukung

Pencapaian tujuan dan indikator tujuan didukung oleh sasaran strategis yaitu **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah** dengan indikator Jumlah PMA/PMDN (investor) serta sasaran penunjang yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran strategis **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah** dengan indikator kinerja **Jumlah PMA/PMDN** (investor) dengan capaian kinerja adalah 704 %, Kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini didukung oleh sejumlah Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yaitu:

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Realisasi
18.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**33,33**
18.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	100,00
18.2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	100,00
18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**205,00**
18.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	100,00
18.3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	100,00
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**105,79**
18.4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00
18.4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.059,56
18.4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	272,80

		Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	
18.4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	113,75
18.4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	96,00
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**125,00**
18.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00
18.5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	100,00
18.5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	102,86
18.5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100,00
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**100,00**
18.6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	100,00
18.6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	500,00

Dari program/kegiatan/subkegiatan tersebut capaian kinerjanya semuanya 100% atau lebih kecuali;

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (33,33%).
2. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (96%).

Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah** adalah:

1. Peninngkatan realisasi penanaman modal diharapkan berbanding lurus dengan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Dengan kemudahan dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka mampu mendorong meningkatnya jumlah PMA/PMDN.
2. Pelaksanaan program Promosi Penanaman Modal yang memuat salah satu program unggulan peningkatan UMKM telah memacu peningkatan jumlah PMDN terutama pada sektor UMKM. Salah satu kegiatan promosi penanaman yang dilakukan melalui CJIBF telah memacu peningkatan jumlah kepeminatan realisasi investasi pada skala menengah besar. Hal ini terbukti dengan jumlah realisasi kepeminatan penanaman modal sebesar 41%
3. Program Pelayanan Penanaman Modal juga sangat berperan dalam peningkatan realisasi penanaman modal. Pada program ini menitik beratkan pada pelayanan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha. Dengan Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berusaha, maka berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penanaman modal.

Sasaran **Penunjang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator kinerja **Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah** Capaian kinerjanya adalah **98%** Kategori **Baik**. Sasaran ini didukung oleh sejumlah program/kegiatan/Subkegiatan yaitu:

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100,00**
2.18.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	116,67
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	96,00
2.18.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	100,00

2.18.01.2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	91,00
2.18.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	100,00
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	237,50
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	100,00
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	100,00
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	148,00
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100,00
2.18.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	100,00
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	100,00
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	100,00
2.18.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	100,00
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	100,00
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	100,00
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00

2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00
2.18.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100,00
2.18.01.2,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100,00
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100,00
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	100,00

Dari program/kegiatan/subkegiatan tersebut yang capaian kinerja semua 100% atau lebih, kecuali;

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (96%), jumlah PNS berkurang dikarenakan pensiun dan jabatan Kepala Dinas selama 1 (satu) tahun dijabat Pelaksana tugas (Plt)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (91 %), bahwa jumlah paket pengadaan pakaian dinas sehari-hari hanya diberikan kepada pegawai/aparatur PNS dan petugas pelayanan.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Belanja

Belanja yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.392.976.870 yang meliputi;

1. Belanja Operasi **Rp. 5.669.187.205,-**
   - Belanja Pegawai Rp. 3.519.382.353,-
   - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.149.804.852,-
2. Belanja Modal **Rp. 2.723.789.665,-**
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.723.789.665,-

Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan adalah sebesar Rp. 7.429.858.474 (88,52%).

Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen adalah sebesar **88,52%.**

b. Realisasi Anggaran Belanja yang mendukung secara langsung IKU

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen terdapat 5 program yang mendukung secara langsung IKU PD yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 99.556.245,- Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **99,5%.**

2. Program Promosi Penanaman Modal

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 152.000.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 146.162.818,-. Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **96,16%.**

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 531.659.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 514.125.500,-**.** Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **97,70%.**

4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 402.873.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 387.470.000,- Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **96,17%.**

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 35.000.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 34.176.000,- Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **98,65%.**

c. Realisasi Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung IKU

   Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen terdapat 1 program yang tidak mendukung secara langsung IKU PD yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.171.444.870,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.248.367.911,-**.** Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **87,13%**

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/ sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Tingkat efisiensi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan sektor Penanaman Modal, terjadi pada beberapa pencapaian *outcome*, yang secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.8
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2022

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KINERJA TAHUN 2022			ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT EFISIENSI (%) (tingkat efisiensi= 100% - (kolom 9))
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,50	2,1	140	1.221.532.000	1.181.490.563	96,72 %	3,28%
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.250	8.770	702 %	1.221.532.000	1.181.490.563	96,72 %	3,28%
1	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	70,10	68,95	98%	7.171.444.870	6.248.367.911	87,13 %	12,87%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen masih berada pada rentang nilai -20% sampai 20% tersebut dan dikategorikan kinerja yang efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian prosedur pengelolaan anggaran hingga realisasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggung jawaban atas dana yang telah dianggarkan pada perangkat daerah. Entitas Akuntansi dan Entitas pelaporan meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD. Hal tersebut adalah merupakan data yang diolah untuk dijadikan suatu informasi guna pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan juga sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang telah diraih selama tahun 2022 serta permasalahan yang sudah dihadapi, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai 140 % atau dengan kategori **Sangat Baik**;
2. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar 702% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
3. Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tercapai sebesar 98% atau dengan kategori **Baik**

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi investasi dengan pemberian insentif dan fasilitas penanaman, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang konsusif.
b. Peningkatan kualitas kajian sektor investasi dengan harapan menjadi pedoman calon yang akan melakukan investasi.
c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui berbagai forum investasi, dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
d. Peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha dan non berusaha

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sragen, Pebruari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
NIP 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/ 45 /18/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
c. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
d. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan

f. menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 03-01-2023

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sragen;
2. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 052/ 45 /18/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tugiyono, SH	Plt.Kepala	Penanggung jawab
2.	Suharti, SKM, M.Kes	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Analis Hukum Ahli Madya/ Koordinator pelayanan terpadu satu pintu	Anggota
6.	Ning Setyowati, SE	Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda/ Subkoordinator Keuangan	Anggota
7.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian dan Pelaksanaan Modal	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Analis Hukum Ahli Muda/Subkoordinator Informasi dan Pengolahan Data	Anggota

1	2	3	4
10.	Sri Umiyarsi, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
11.	Atikah Yuliana, SS	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
12.	Ariyanto, SE	Analis Hukum Ahli Muda/ Subkoordinator pelayanan Perizinan dan nonperizinan	Anggota
13.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
14.	Nasrun NUgroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010